

PENDAMPINGAN PENGUATAN TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA POPISI KECAMATAN PELING TENGAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Yenni^{1*}, Jamaludin Bahtiar Gui¹, Iqra Djuman¹, Andin Nur Aini¹, Moh. Fadil¹, Nia Ramadan Handu¹,
Sri Melani A. Djamir¹, Kilya Utari U Day¹, Darmawati Syarif¹, Putri Cantika¹

¹Universitas Muhammadiyah Luwuk, Luwuk, Indonesia

effendhyenni88@gmail.com

jamaludingui23@gmail.com

iqrasalaf@gmail.com

andinnuraaini14@gmail.com

mohf74513@gmail.com

niaramadanihandu@gmail.com

srimelani69234@gmail.com

taridyy@gmail.com

d4rma.05@gmail.com

putricantikasena75@gmail.com

Abstract

Effective and transparent village administrative governance is a cornerstone of achieving good village governance. However, limited understanding and skills among village officials often serve as major obstacles to accountable administrative management. This community service initiative aims to enhance the capacity and capabilities of officials in Popisi Village, Peling Tengah District, Banggai Kepulauan Regency, through a program involving outreach and guidance on village administrative governance. The implementation method involved direct mentoring provided to the Popisi Village government. The process comprised several stages: initial observation, coordination with the village government, and the mentoring sessions themselves, which were held at the Popisi Village office and attended by village government representatives. The desired outcome of this activity was to improve the village government's knowledge and ability to implement the Peling Tengah District information system. The program successfully raised awareness among village officials regarding the importance of administrative orderliness in delivering superior public services. Sustaining this program requires periodic digital mentoring to ensure consistent governance performance at the village level.

Keywords: Administration, Village Official Capacity, Village Governance.

Abstrak

Tata kelola administrasi desa yang efektif dan transparan merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik (good village governance). Namun, keterbatasan pemahaman dan keterampilan perangkat desa sering kali menjadi hambatan utama dalam pengelolaan administrasi secara akuntabel. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perangkat Desa Popisi Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui program sosialisasi dan pendampingan tata kelola administrasi desa. Metode pelaksanaan pengabdian yakni menggunakan metode pendampingan langsung ditujukan kepada Pemerintah Desa Popisi Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan. Adapun pelaksanaannya meliputi beberapa tahapan pelaksanaan yaitu dimulai dari observasi, melakukan koordinasi dengan pemerintah desa selanjutnya dilaksanakan pendampingan yang dilakukan di kantor desa Popisi yang dihadiri oleh unsur pemerintahan desa. Hasil akhir yang diinginkan dari kegiatan ini adalah peningkatan pengetahuan dan kemampuan pemerintah desa dalam penerapan system informasi Kecamatan Peling Tengah. Implementasi program ini berhasil mendorong kesadaran perangkat desa akan pentingnya tertib administrasi demi pelayanan publik yang lebih prima. Keberlanjutan program ini memerlukan pendampingan berkala secara digital guna menjaga konsistensi performa tata kelola di tingkat desa.

Kata Kunci: Administrasi, Kapasitas Perangkat Desa, Tata Kelola Desa.

Pendahuluan

Desa saat ini tidak lagi menempati posisi sebagai latar belakang pembangunan nasional, melainkan telah bergeser menjadi garda terdepan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi yang luas bagi pemerintah desa untuk mengelola tata pamong, pembangunan, dan keuangan desa secara mandiri. Konsekuensi dari besarnya wewenang dan kucuran dana desa yang diterima menuntut adanya sistem tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Salah satu pilar utama untuk mewujudkan hal tersebut adalah tertib tata kelola administrasi desa. Administrasi desa yang tertib, transparan, dan akuntabel merupakan cerminan dari kualitas pelayanan publik di tingkat dasar. Administrasi yang baik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pencatatan data publik, tetapi juga menjadi instrumen hukum, basis data perencanaan pembangunan, serta bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat dan pemerintah pusat (Fanzikri, 2022). Berdasarkan regulasi terbaru, administrasi desa setidaknya mencakup administrasi umum, penduduk, keuangan, pembangunan, dan administrasi BPD.

Pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa lainnya memiliki tugas dan tanggung jawab serta kewajiban untuk memberikan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang prosesnya harus melalui administrasi desa (Rohmah, Rika Rizki, Asror, Zainul, Purwanto, Wafiroh, 2025). Berdasarkan Undang-undang No. 6 tentang desa, menyatakan bahwa pemerintah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas manajemen pemerintah desa, yaitu manajemen perencanaan pembangunan, manajemen administrasi desa, dan manajemen pengelolaan keuangan pemerintah desa. Saat ini, masih banyak desa dan perangkat desa yang memiliki masalah terkait belum memadainya kemampuan perangkat desa dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintahan, yaitu manajemen perencanaan pembangunan desa, manajemen administrasi desa.

Dalam konteks pembangunan nasional, desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Nugroho, 2025). Desa bukan hanya sekadar unit administratif, tetapi juga ruang hidup masyarakat yang menjadi pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, tata kelola administrasi desa yang baik menjadi fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warganya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak perangkat desa yang menghadapi keterbatasan kapasitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan desa, serta pelaksanaan program pembangunan yang sering kali belum optimal. Di sinilah pentingnya kegiatan sosialisasi penguatan kapasitas perangkat desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa agar mampu menjalankan tugas dan fungsi secara profesional (Barasa & Sihotang, 2025).

Sistem pemerintahan yang tidak diperhatikan dengan baik akan mengakibatkan kerugian bagi Masyarakat (Yusrizal et al., 2025). Ketertiban system administrasi dimulai dari tersedianya buku administrasi umum, kependudukan, pembangunan, dan lain-lainnya Pemerintah desa dituntut agar dapat melakukan pengelolaan administrasi dengan baik sehingga menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan desa yang baik dan akuntabel Desa juga memiliki anggaran besar yang berasal dari pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan daerah sehingga desa harus mempertanggungjawabkan tata kelola keuangan dana desa tersebut secara transparan dan akuntabel agar dana desa yang telah diberikan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan di desa. Dalam melakukan peningkatan kapasitas administrasi desa digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis administrasi, tetapi juga menekankan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dengan adanya penguatan kapasitas, perangkat desa diharapkan dapat lebih memahami prosedur administrasi, menguasai teknologi informasi, serta mampu menyusun laporan dan dokumen sesuai standar yang ditetapkan (Yaya Mulyana et al., 2025). Pada akhirnya, penguatan kapasitas ini akan

berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan mendukung terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan penguatan perangkat desa dalam tata kelola administrasi desa pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Penguatan kapasitas ini bertujuan agar desa mampu menjadi unit pemerintahan yang mandiri, profesional, dan berorientasi pada pelayanan Masyarakat (Sujana et al., 2020).

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pendampingan ini dilaksanakan tanggal 27 Juli sampai dengan 04 Agustus 2026, yang diawali dengan tahapan observasi sampai pada tahapan pelaksanaan yang bertempat di Kantor Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah. Pada tahap pelaksanaan kegiatan ini dimulai dengan tahapan observasi kepada pemerintah Desa Popisi Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan, kemudian dilanjutkan dengan koordinasi kepada Pemerintah desa, setelah melakukan koordinasi dilanjutkan dengan persiapan tempat pelaksanaan pendampingan Penguatan Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa Popisi. Tahapan tahapan dengan metode pelaksanaan kegiatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1 : Metode Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Pelaksanaan	Kegiatan	Metode	Materi
Observasi	Melakukan Observasi di Desa Popisi Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan	Pertemuan dengan pemerintah Desa	Observasi tentang Pendampingan Penguatan Tata Pemerintah Desa.
Koordinasi	Melaksanakan Koordinasi dengan Pemerintah Desa dengan mengatur lokasi, waktu, dan pelaksanaan kegiatan pendampingan.	Pertemuan dengan pemerintah Desa	Mengkoordinasikan dengan pemerintah desa mengenai waktu, tempat dan narasumbernya dan juga mengkoordinasikan kapan pelaksanaan kegiatan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penguatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Tata Kelola Administrasi Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan secara tatap muka dengan melibatkan pemerintah Desa Popisi, narasumber, dan tim pelaksana kegiatan. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan aparatur desa dalam melaksanakan tata kelola administrasi secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan tugas serta fungsi masing-masing. Penguatan kapasitas administrasi menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran pendataan, pengelolaan dokumen, penyampaian informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1) Observasi Kegiatan

Kegiatan observasi dilaksanakan pada 23 Juli 2026 bertempat di Kantor Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan. Observasi dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi langsung dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Popisi. Tahap ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi awal tata kelola administrasi desa serta memahami tingkat pemahaman aparatur terhadap pentingnya penguatan kapasitas dalam pengelolaan administrasi. Hasil observasi menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan pendampingan yang sesuai dengan kondisi aparatur desa. Melalui interaksi langsung tersebut, tim pelaksana dapat

memperoleh informasi mengenai berbagai aspek administrasi yang perlu diperkuat sehingga kegiatan pendampingan dapat diarahkan pada kebutuhan nyata pemerintah Desa Popisi.



Gambar 1. Kegiatan observasi dan identifikasi kondisi

2) Koordinasi Kegiatan

Tahap koordinasi dilaksanakan pada 27 Juli 2026 di Kantor Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah desa untuk memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan, termasuk penentuan waktu, tempat, peserta, serta narasumber atau pendamping yang akan terlibat. Koordinasi menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pemerintah desa. Melalui komunikasi secara langsung, berbagai persiapan kegiatan dapat disepakati bersama sehingga pelaksanaan pendampingan dapat berjalan secara lebih terarah dan melibatkan pemerintah desa secara aktif.



Gambar 2. Kegiatan koordinasi bersama dalam mempersiapkan waktu, tempat, peserta, dan narasumber pendampingan.

3) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pendampingan dilaksanakan pada 29 Juli 2026 bertempat di Balai Desa Popisi, Kecamatan Peling Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan. Kegiatan difokuskan pada penguatan pemahaman aparatur mengenai pentingnya tata kelola administrasi desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui interaksi langsung antara tim pendamping dan aparatur pemerintah desa. Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya tertib administrasi serta didorong untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi dan pelayanan masyarakat. Proses pendampingan berlangsung secara partisipatif melalui komunikasi dan diskusi sehingga aparatur memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman, kendala, serta kebutuhan yang dihadapi dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Antusiasme pemerintah desa terlihat dari keterlibatan aktif selama kegiatan berlangsung. Aparatur mengikuti proses pendampingan dengan memberikan tanggapan, menyampaikan pertanyaan, dan berdiskusi mengenai kondisi administrasi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan sekaligus komitmen aparatur untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola administrasi desa. Melalui kegiatan

pendampingan ini, aparatur Desa Popisi memperoleh penguatan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya tata kelola administrasi yang tertib, sistematis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Hasil kegiatan diharapkan tidak hanya memberikan manfaat pada saat pendampingan berlangsung, tetapi juga dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa.



Gambar 3. Pelaksanaan pendampingan penguatan kapasitas aparatur dalam tata kelola Administrasi

Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan adanya keterlibatan aktif aparatur Desa Popisi dalam setiap tahapan pendampingan. Kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga memberikan ruang bagi aparatur desa untuk berdiskusi, menyampaikan permasalahan, dan memperoleh pemahaman yang lebih praktis mengenai pengelolaan administrasi desa. Proses pendampingan diarahkan agar aparatur desa memiliki kesadaran bahwa tertib administrasi merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Adapun hasil yang dicapai dalam setiap tahapan kegiatan meliputi:

1. Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku

Tahap awal diarahkan pada pembentukan kesadaran aparatur Desa Popisi mengenai pentingnya tata kelola administrasi desa. Aparatur diberikan pemahaman bahwa administrasi yang tertib bukan hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen, tetapi juga menjadi dasar dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui proses pendampingan, aparatur didorong untuk memiliki sikap tanggap, peduli, dan terbuka terhadap berbagai masukan yang disampaikan masyarakat. Kesadaran tersebut diharapkan dapat mendorong aparatur desa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, proses pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih tertib, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Tahap Transformasi Pengetahuan dan Keterampilan

Tahap berikutnya berfokus pada peningkatan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan aparatur desa dalam melaksanakan tata kelola administrasi. Aparatur didorong untuk memahami berbagai aspek administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan masyarakat sehingga mampu memberikan informasi secara jelas dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi. Pendampingan juga memberikan ruang kepada aparatur untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pelayanan. Dengan wawasan dan keterampilan yang lebih baik, aparatur diharapkan mampu memberikan respons terhadap permasalahan masyarakat secara lebih tepat serta membangun komunikasi yang terbuka. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar untuk menciptakan pelayanan pemerintahan desa yang lebih efektif dan mendukung terciptanya tata kelola desa yang lebih baik.

3. Tahap Peningkatan Kemampuan dan Kecakapan Aparatur Desa

Tahap selanjutnya diarahkan pada penguatan kemampuan intelektual dan kecakapan aparatur dalam menerapkan tata kelola administrasi desa. Peningkatan kapasitas tidak berhenti pada kegiatan pendampingan, tetapi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar aparatur semakin terampil dalam

mengelola administrasi dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, aparatur desa diharapkan memiliki kesadaran yang lebih kuat terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Kemampuan dalam mengelola administrasi secara tertib akan mendukung tersedianya informasi dan dokumen pemerintahan desa yang lebih terorganisasi serta memberikan dasar yang lebih baik bagi pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Kegiatan pendampingan penguatan kapasitas aparatur Desa Popisi menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas perangkat desa merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan masyarakat. Hasil observasi dan koordinasi menunjukkan bahwa kebutuhan penguatan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman administratif, tetapi juga dengan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas secara tertib, sistematis, responsif, dan sesuai dengan fungsi masing-masing. Hal ini sejalan dengan Azwar et al. (2025), yang menunjukkan bahwa penguatan kapasitas pemerintahan desa melalui edukasi mengenai sistem administrasi dan tata kelola dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perangkat desa. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Pardede et al. (2026), bahwa pelatihan administrasi desa yang memadukan penyampaian materi, diskusi, dan kegiatan praktis dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan aparatur desa. Dengan demikian, pelaksanaan pendampingan di Desa Popisi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses penguatan kapasitas aparatur agar mampu menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan secara lebih efektif.

Keterlibatan aktif pemerintah Desa Popisi selama proses pendampingan menjadi salah satu aspek penting dalam pencapaian kegiatan. Partisipasi aparatur dalam diskusi dan penyampaian permasalahan administrasi memungkinkan proses pendampingan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Pendekatan semacam ini penting karena penguatan kapasitas tidak cukup dilakukan melalui penyampaian informasi secara satu arah, tetapi perlu memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan materi dengan pengalaman dan permasalahan yang mereka hadapi. Pardede et al. (2026) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif melalui diskusi, brainstorming, dan kegiatan praktis mampu menghasilkan respons positif serta meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta. Temuan tersebut memperkuat hasil kegiatan di Desa Popisi, di mana keterlibatan aktif aparatur menjadi modal penting untuk mendorong perubahan dari sekadar memahami konsep administrasi menuju kemampuan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Selain itu, kegiatan penguatan kapasitas yang dilaksanakan secara praktik juga memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan keterampilan yang dapat diterapkan setelah kegiatan selesai. Hal tersebut sejalan dengan Naufal et al. (2025) menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik dan evaluasi dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan peserta dan mendorong kesiapan untuk menerapkan keterampilan secara mandiri.

Penguatan tata kelola administrasi Desa Popisi juga perlu dipahami dalam konteks perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang semakin menuntut adanya tata kelola yang tertib, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan secara efektif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan kembali pentingnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keuangan, aset, dan pembangunan desa dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih kuat dan mandiri. Peraturan Penelitian Yelipele (2025) juga menunjukkan bahwa administrasi desa mencakup berbagai domain penting, termasuk administrasi umum, kependudukan, keuangan, pembangunan, dan administrasi lainnya, sehingga kapasitas aparatur menjadi faktor penting dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pendampingan di Desa Popisi perlu dipandang sebagai langkah awal yang dapat dikembangkan menuju pembenahan administrasi yang lebih sistematis. Penguatan tersebut dapat dilanjutkan melalui penyusunan dan pembaruan dokumen administrasi, pembagian tugas yang jelas, penggunaan prosedur kerja yang baku, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan. Arah ini juga sejalan dengan kegiatan pendampingan pengelolaan website kelurahan yang

menempatkan digitalisasi sebagai salah satu strategi untuk mendukung pelayanan masyarakat dan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi (Usman et al., 2026).

Dengan demikian, hasil kegiatan di Desa Popisi memperlihatkan bahwa pendampingan tata kelola administrasi memiliki dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu penguatan kapasitas individu aparatur dan penguatan sistem administrasi pemerintahan desa. Peningkatan kemampuan aparatur akan lebih bermakna apabila diikuti dengan pembenahan sistem kerja, dokumentasi, prosedur pelayanan, dan mekanisme koordinasi di lingkungan pemerintah desa. Pengalaman dari kegiatan pengabdian lain juga menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur dapat diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan desa (Pardede et al., 2026; Rahanra et al., 2025). Oleh karena itu, keberlanjutan program Desa Popisi sebaiknya diarahkan pada pendampingan berkala, evaluasi administrasi, praktik penyusunan dokumen, serta pengembangan tata kelola berbasis teknologi secara bertahap. Dengan pendekatan tersebut, kegiatan pendampingan tidak berhenti pada peningkatan pemahaman aparatur, tetapi dapat berkembang menjadi proses perbaikan tata kelola yang berkelanjutan dan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan, dapat disimpulkan bahwa penguatan kapasitas perangkat Desa Popisi melalui tahapan observasi, koordinasi, dan pendampingan secara langsung dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan perangkat desa dalam melaksanakan tata kelola administrasi pemerintahan desa sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Saran yang dapat diberikan adalah agar Pemerintah Desa Popisi melakukan tindak lanjut melalui pendampingan secara berkala, pembagian tugas yang lebih terstruktur, penataan dokumen administrasi secara tertib, serta peningkatan kemampuan perangkat desa dalam memberikan pelayanan dan merespons kebutuhan masyarakat. Implikasinya, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat pada peningkatan kemampuan individu perangkat desa, tetapi juga berpotensi memperkuat tata kelola kelembagaan Desa Popisi melalui administrasi yang lebih tertib, pelayanan yang lebih sistematis, komunikasi yang lebih efektif, serta meningkatnya kesadaran perangkat desa terhadap tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Keberlanjutan kegiatan pendampingan diperlukan agar pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dapat diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Ucapan Terimakasih

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Luwuk dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Pemerintah Desa Popisi Kecamatan Peling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan beserta seluruh perangkat

Referensi

- Agnaf Naufal, M., Dias Nanda, A., Primagati, A., Nur Hidayat, F., Najwa, R., & Haris, A. (2025). Peningkatan kapasitas kelompok tani dan karang taruna Desa Peron melalui pelatihan pembuatan pupuk organik cair dari limbah kulit kopi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala*, 5(2), 3798–3804. <https://doi.org/10.51574/patikala.v5i2.3786>
- Azwar, A., Meiwindi, E. R., Lucyana, L., Hasibuan, R., & Zulkarnain, M. (2025). Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam menjalankan administrasi pemerintahan di Desa Batu Winangun. *Jurnal Dehasen Untuk Negeri*, 4(2), 301–304. <https://doi.org/10.37676/jdun.v4i2.8921>
- Barasa, I. S., & Sihotang, J. (2025). Penguatan kapasitas aparatur desa melalui pendampingan administrasi pemerintahan di Kecamatan Parilitan Kabupaten Humbang Hasundutan. *Development: Journal of Community Engagement*, 4(4), 818–826. <https://doi.org/10.46773/gd0n3w66> Garuda Kemdiktisaintek

- Fanzikri, M. (2022). Pendampingan pemerintahan gampong dalam meningkatkan tata kelola administrasi desa (Best practice di Gampong Teungoh Baro). *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 8(2), 320–341. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v8i2.15622> [Jurnal Ar-Raniry](#)
- Mulyana, Y., Aziz, A., Nadila, D., & Lestari, R. (2025). Tata kelola pemerintahan dalam rangka penguatan kapasitas perangkat Desa Pameuntasan. *Katalis: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 48–53. <https://doi.org/10.63288/jipm.v1i2.7> [Candela Edutech](#)
- Pardede, P. D. K., Lase, A., Panjaitan, D. T. M. R., & Simamora, P. R. T. (2026). Peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan perencanaan pembangunan dan tata kelola administrasi desa di Kecamatan Namorambe. *Jurnal Atma Inovasia*, 6(3), 233–242. <https://doi.org/10.24002/jai.v6i3.13243>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Rahanra, I. Y., Soselisa, P. S., Ponto, I. S., & Sakir, A. R. (2025). Strengthening the capacity of village government officials in Negeri Suli, Salahutu District, Central Maluku Regency. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(2), 739–749. <https://doi.org/10.32815/jpm.v6i2.2807> [Jurnal STIE Asia](#)
- Sujana, E., Saputra, K. A. K., & Manurung, D. T. H. (2020). Internal control systems and good village governance to achieve quality village financial reports. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(9), 98–108. [Nakhoda](#)
- Usman, I., Hijrah, M., Rahayu, P. I., Hidayatullah, M., Budi Andy B, A., & Arfah, N. (2026). Pendampingan pengelolaan website kelurahan: Strategi digitalisasi pelayanan masyarakat di era *smart village*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Patikala*, 5(3), 4153–4158. <https://doi.org/10.51574/patikala.v5i3.4220>
- Yelipele, I. (2025). Evaluating village administration across five governance domains: Evidence from Apenas Village, Jayawijaya Regency, Indonesia. *Unisia*, 43(1). <https://doi.org/10.20885/unisia.vol43.iss1.art23>
- Yusrizal, M., Ramlan, T., Erwinsyahbana, T., & Hajar, S. (2025). Pendampingan penyusunan peraturan desa dalam mendukung tata pemerintahan di Desa Tanjung Mulia Kecamatan Hinai. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 796–803. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.70>